

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan

Dalam memahami adanya tindakan manajemen laba dalam perusahaan didasarkan pada sebuah teori yaitu teori keagenan sebagai dasar adanya manajemen laba. Palestine (2007) menyatakan bahwa penjelasan tentang konsep manajemen laba tidak terlepas dari teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan (*agency theory*) mengemukakan jika antar pihak *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) memiliki kepentingan yang berbeda, muncul konflik yang dinamakan konflik keagenan (*agency conflict*). Teori keagenan muncul ketika satu orang investor (*principal*)/lebih memperkerjakan orang lain (*agent*)/manajer untuk melakukan suatu pekerjaan dan memberikan tanggung jawab kepada *agent* untuk mengelola perusahaan. Hubungan antara investor dengan manajer dapat mengarah pada ketidakseimbangan informasi, karena manajer mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan, manajer dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri dengan memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan yang dapat merugikan investor, dalam mengatasi masalah tersebut *principal* harus mempunyai cara agar manajer tidak berlaku semena-mena terhadap investor dengan cara memberikan beberapa saham perusahaan agar mencegah *agent* berlaku semena-mena terhadap *principal*.

2. Manajemen Laba.

Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggungjawabnya, yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang (Palestin, 2007).

Manajemen Laba adalah suatu tindakan yang dilakukan manajer hanya untuk kepentingannya sendiri dan sengaja untuk bisa memanipulasi laporan keuangan. Manajemen Laba didasarkan adanya perbedaan kepentingan atau yang biasa disebut teori agensi yang menjelaskan adanya hubungan agensi (*agency problem*) yang terjadi ketika pemilik saham (*principal*) memberikan wewenang serta tanggung jawab dalam pengambilan keputusan terhadap manajer, Pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan ini yang memunculkan permasalahan baru yang bersumber pada perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, karena manajer memiliki informasi mengenai perusahaan, manajer dapat merugikan pemilik dengan bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri, sehingga informasi yang didapat tidak disampaikan kepada pemilik secara aktual., dalam hal ini diperlukan adanya peraturan yang mengatur mengenai tata kelola perusahaan yang baik untuk menghindari para manajer melakukan manajemen laba, peraturan tersebut adalah *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 1 Juli 2001 yang nantinya akan mengatur mengenai pembentukan dewan komisaris independen dan komite audit (Aji, 2012). *Good corporate governance* nantinya akan mengatur tentang tata kelola perusahaan yang baik agar dapat menghindari manajer untuk melakukan manajemen laba. dari definisi tersebut maka manajemen laba adalah suatu cara yang dilakukan dengan sengaja oleh manajer untuk mempengaruhi laba dengan tujuan untuk kepentingan stakeholder dan untuk memaksimalkan nilai pasar perusahaan.

B. Penelitian terdahulu dan Hipotesis

1. Proporsi Dewan Komisaris

Di dalam sebuah perusahaan, dewan direksi memiliki peran penting yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh perusahaan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. (Aji, 2012) menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi pula. Sedangkan menurut (Suryani, 2010) kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi dari pemisahan antara manajemen dan kontrol

Dewan komisaris dalam perusahaan mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dibuat oleh manajer. Tugas serta tanggung jawab dewan komisaris sangatlah penting guna mencegah manajer untuk tidak melakukan tindakan manajemen laba, maka dari itu dewan komisaris diberikan akses pada informasi perusahaan serta memberikan pengawasan efektifitas pelaksanaan good corporate governance.

Gonzales dan Meca (2013), melakukan penelitian yang menggunakan sampel perusahaan non-keuangan di Amerika dari periode 2006-2009, dimana mereka mengatakan bahwa dewan komisaris yang sering bertemu akan mengambil lebih banyak posisi dalam hal monitoring yang akan mempersempit tindakan manajemen laba. Namun penelitian mereka tidak sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Sefiana (2010) mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh untuk mengurangi manajemen laba pada perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan. Hal ini juga didukung penelitian Pujiningsih (2011) serta dari Isnanta (2008) Revianni(2012) Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan negatif terhadap praktik manajemen laba, ini dikarenakan tidak adanya kemampuan dewan komisaris untuk bisa mengendalikan dan mengawasi manajemen untuk tidak melakukan manajemen laba. Dalam uraian yang telah dipaparkan maka rumusan hipotesisnya yaitu:

H₁ : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2. Ukuran Dewan Komsiaris.

Ukuran dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan, dengan adanya dewan komisaris menjamin transparansi dan keinformatifan laporan keuangan sehingga memfasilitasi hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang berkualitas (Suryani, 2010).

Tugas Utama Komisaris adalah Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing

Anggota Komisaris namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Komisaris secara Kolektif (sebagai Board). Fungsi pengawasan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Komisaris wajib berkomitmen tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas komisaris secara bertanggungjawab.

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba memiliki hasil yang beragam seperti penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007), mereka mengatakan bahwa semakin banyaknya anggota dewan komisaris akan menekan adanya indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Namun penelitian mereka tidak didukung dengan penelitian Jao (2010) yang mengatakan bahwa makin banyaknya personel yang menjadi anggota dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Palestin (2007) Wahyuningsih (2008) dan Aji (2012) yang mengatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dari adanya praktik manajemen laba pada suatu perusahaan, ini dikarenakan faktor penentu efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan bukanlah dari ukuran dewan komisaris saja namun dari divisi lain dalam perusahaan juga yang memberikan pengawasan sehingga dewan komisaris tidak berfokus kepada manajemen dalam hal pengawasannya. Dari penjelasan diatas rumusan hipotesisnya yaitu:

H₂ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

3. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (Aji, 2012).

Komite audit mempunyai tugas serta peran yang sangat penting didalam perusahaan yang dalam peranannya diharapkan untuk dapat membantu dewan komisaris melakukan pengawasan kepada manajer mengenai tanggung jawabnya dalam proses membuat laporan keuangan yang berkualitas serta aktual.

Komite audit juga mempunyai tanggung jawab pada perusahaan dalam kaitannya untuk : (1) melakukan penilaian terhadap perusahaan kaitannya dengan hukum dan perundang-undangan apakah sudah dijalankan sesuai atau belum, memberikan pendapat independen jika terdapat adanya perbedaan pendapat antara manajemen dengan akuntan dan (3) menjaga kerahasiaan data dokumen maupun informasi penting mengenai perusahaan.

Sefiana (2010) menguji pengaruh komite audit terhadap manajemen laba dengan menggunakan sampel perusahaan perbankan yang listing di BEJ tahun 2007-2008 mendapatkan hasil bahwa komite audit justru berpengaruh negatif, artinya komite audit tidak mampu mengurangi tindak manipulasi laba oleh manajemen. Hal ini berarti bahwa ada atau tidak adanya komite audit dalam suatu perusahaan belum tentu dapat mengurangi manajemen laba, hal ini dikarenakan mengingat lemahnya praktik Corporate Governance di Indonesia.

Nasution dan Setiawan (2007) Agustia (2012) Palestin (2006) Suryani (2010) dan Revianni (2012) mengatakan sebaliknya, mereka mendapatkan hasil dimana komite audit memberikan hasil yang positif terhadap manajemen laba, hal ini dikarenakan dengan adanya Komite audit dalam perusahaan akan mencegah manajer untuk merevisi laporan keuangan sehingga bisa meminimalisir manajemen untuk tidak melakukan manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut hipotesisnya adalah:

H₃ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba

C. Kerangka pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar variabel independen berupa proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit mempengaruhi variabel dependennya yaitu manajemen laba

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Mekanisme Corporate Governance

